

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Afwit Freastoni, 2013, "Perizinan sebagai Instrumen Tanggung Jawab Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara", Jurnal Konstitusi Kerjasama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan PK2P-FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume II Nomor 1, September 2013, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ahmad Fikri Hadin, 2013, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Genta Press.
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Aspek-aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penataan Ruang Suatu Kaji Ulang terhadap UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 1995.
- Herman Hermit, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Hotma. P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga.
- Husni Thamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Nuansa, 2013.
- Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982.
- Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, FH UMY, 2007.
- Philipus Mandiri Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2008.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

Sujanto, 1994, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

T. Hani Handoko, 1990, *Manajemen Edisi II*, Yogyakarta, BPFE.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan

Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

UU RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **Internet**

[http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/98717/pangan/lahan\\_pertanian\\_di\\_diy\\_setiap\\_tahun\\_beralih\\_fungsi\\_200\\_hektar.html](http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/98717/pangan/lahan_pertanian_di_diy_setiap_tahun_beralih_fungsi_200_hektar.html) diunduh Rabu, 8 April 2015 jam 2:48 WIB (22 Agustus 2014).

<http://jogja.solopos.com/baca/2014/08/28/penyusutan-lahan-pertanian-di-sleman-tertinggi-di-diy-530473> diunduh Kamis, 2 April 2015 jam 12.50 WIB.

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>.